

Judul : Pansus RUU Pemilu Nyerah, Prehold Dibagi Jadi 5 Paket
Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pansus RUU Pemilu Nyerah, Prehold Dibagi Jadi 5 Paket

Hari ini, Pansus RUU Pemilu menggelar rapat kerja terakhir untuk pengambilan keputusan tingkat 1. Namun, sampai kemarin, Pansus belum juga mencapai kata sepakat mengenai lima isu krusial dalam RUU Pemilu itu. Untuk menyiasati agar pembahasan tidak deadlock, Pansus membuat lima paket, atau lebih tepatnya pilihan, dari lima isu krusial tersebut.

LIMA isu krusial yang dimaksud adalah penataan daerah pemilihan (dapil), sistem Pemilu, metode konversi suara, presidential threshold (prehold), dan parliamentary threshold (PT). Namun, yang paling menjadi perdebatan selama ini adalah prehold. Pemerintah ingin agar prehold tetap di 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah. Sedangkan fraksi-fraksi di DPR pecah. Ada yang setuju dengan Pemerintah, ada yang menginginkan prehold diturunkan

jadi 10 persen, ada juga yang minta prehold ditiadakan.

Kemarin, Pansus menggelar rapat internal untuk membahas masalah ini. Namun, tidak ada kesepakatan juga. "Hasil rapat Pansus secara internal hari ini (kemarin, red) terkait opsi paket isu krusial dan persiapan untuk menghadapi raker besok (hari ini, red) bersama dengan Pemerintah," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di Gedung DPR, kemarin.

Lima paket yang dimaksud

sudah dibagi-bagi sesuai usulan masing-masing fraksi. Paket A: prehold 20/25 persen, PT 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, konversi suara menggunakan saint lagu murni. Paket B: Prehold 0 persen, PT 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, konversi suara menggunakan kuota hare. Paket C: prehold 10/15 persen, PT 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, konversi suara menggunakan kuota hare. Paket D: prehold 10/15 persen, PT 5 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-8, konversi suara menggunakan saint lagu murni. Paket E: prehold 20/25 persen, PT 3,5 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, konversi suara menggunakan kuota hare.

Kelima paket itu akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Lukman berharap, dalam rapat nanti akan disepakati salah satu paket. Sehingga dalam Rapat Paripurna 20 Juli nanti, RUU itu tinggal diketok. "Jadi, besok (hari ini, red) itu dalam raker pandangan fraksi, diungkapkan atau menyampaikan hasil musyawarah terhadap salah satu dari lima opsi tadi," kata politisi PKB ini.

Jika tak juga ada kata sepakat, lanjutnya, kelima paket itu terpaksa akan dibawa ke Rapat Paripurna. Di Rapat Paripurna, mekanisme pengambilan keputusan hanya satu, yaitu lewat voting. "Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai besok (hari ini, red), ya maka kelima opsi dibawa ke Paripurna untuk diambil keputusan melalui voting," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menawarkan tiga opsi

jika pembahasan lima isu krusial dalam RUU Pemilu berakhir buntu. "Ops pertama, menerima bersama-sama seluruh anggota Pansus DPR musyawarah mufakat. Opsi kedua, Pemerintah menerima opsi putusan pada pengambilan keputusan tingkat I. Atau (opsi terakhir), Pemerintah mengembalikan ke Undang-Undang yang lama. Toh, sama saja, enggak ada perubahan," katanya.

Tjahjo mengatakan, jika menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama, tidak memerlukan Perppu untuk legitimasinya. Dia pun yakin tidak akan ada masalah. Dalam dua Pemilu terakhir, tak ada permasalahan sama sekali walau menggunakan undang-undang yang lama. "Nyatanya, dua kali Pemilu lancar. Dua kali Pilkada serentak (juga) lancar," ujarnya. ■ KAL